

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan menjadi tantangan bagi pembangunan di Indonesia. Menurut Pratiwi (2022), kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang menyulitkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup serta mencapai standar kesejahteraan yang berlaku di masyarakat secara umum. Permasalahan kemiskinan merupakan isu yang sangat penting dan mendesak dibandingkan dengan berbagai persoalan lainnya, sehingga diperlukan upaya yang serius dan terarah untuk mencegah atau mengurangi jumlah penduduk miskin agar suatu negara tidak mengalami keterbelakangan pembangunan (Andina & Wahyudi, 2024). Pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS), Pengurangan tingkat kemiskinan adalah suatu yang menjadi perhatian serius, hal ini dibuktikan dari penanggulangan kemiskinan dan kelaparan yang menjadi tujuan pertama untuk mengakhiri kemiskinan (Dahliah & Nur, 2021). Kemiskinan juga dikatakan sebagai kondisi suatu masyarakat berada dalam ekonomi rendah, sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk mengurangi angka kemiskinan itu sendiri guna untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera di dalam suatu Negara (Alma'ruf, 2023).

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan besar dalam pembangunan nasional yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya serta telah menjadi isu yang perlu untuk dicarikan solusi dalam memberantasnya (Mansi et al., 2020). Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi suatu daerah terutama Sumatera Barat (Hafiz & Kurniadi, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang angka persentase kemiskinannya masih tergolong tinggi dan mengalami peningkatan. Angka kemiskinan yang masih naik turun tersebut menunjukkan belum stabilnya kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Terdapat berbagai tantangan

dihadapi oleh masyarakat seperti keterbatasan lapangan kerja, ketimpangan akses pendidikan, dan dampak ekonomi dari bencana alam membuat masalah kemiskinan di Sumatera Barat masih berada di angka yang tinggi.

Berikut ini adalah data persentase penduduk miskin di 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019 hingga 2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat pada tahun 2023.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin di 10 Provinsi Pulau Sumatera
tahun 2019 – 2023

Provinsi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	15.32	15.43	15.53	14.64	14.45
Sumatera Utara	8.49	8.75	8.79	8.49	8.21
Sumatera Barat	6.42	6.56	6.63	5.92	5.95
Riau	6.74	7.04	6.78	6.62	6.33
Jambi	7.27	7.97	7.62	6.97	6.73
Sumatera Selatan	12.56	12.98	12.79	11.95	11.80
Bengkulu	15.03	15.30	15.17	14.43	14.40
Lampung	12.30	12.76	12.62	11.57	11.11
Kepulauan Bangka Belitung	5.91	6.13	6.21	5.88	5.66
Kepulauan Riau	4.52	5.04	5.07	4.95	4.77

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)

Badan Pusat Statistik pada gambar 1.1, menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera mengalami tren penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2021 ke 2023, terutama setelah puncak pandemi COVID-19. Sumatera Barat menunjukkan pola yang sedikit berbeda, setelah mengalami penurunan tajam

dari 6,63% pada tahun 2021 menjadi 5,92% pada tahun 2022, angka kemiskinan justru mengalami sedikit peningkatan kembali menjadi 5,95% di tahun 2023. Meskipun angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti Aceh atau Bengkulu, kenaikan ini mengindikasikan adanya potensi permasalahan struktural yang perlu diteliti lebih lanjut, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, efektivitas program bantuan sosial, atau lambatnya pemulihan di sektor tertentu.

Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 5,95%, yang menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam menjaga stabilitas program penanggulangan kemiskinan agar tren penurunan dapat berlanjut secara konsisten. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting dalam konteks ekonomi daerah, seperti bagaimana pengaruh variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan capaian pendidikan terhadap fluktuasi kemiskinan. Sumatera Barat sebelumnya dikenal memiliki salah satu angka kemiskinan terendah di Sumatera, sehingga adanya kenaikan meski kecil patut dicermati secara lebih spesifik. Dengan demikian, meneliti kemiskinan di Sumatera Barat tidak hanya penting untuk memahami dinamika lokal, tetapi juga untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dalam mencegah potensi peningkatan kemiskinan di masa depan.

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat tercatat sebesar 340,37 ribu jiwa atau 5,95 persen dari total penduduk (BPS, 2023). Angka ini menurun dibandingkan periode sebelumnya, akan tetapi masih menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum menikmati hasil pembangunan secara merata. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengakui bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan sosial, melainkan memerlukan strategi terpadu yang menyentuh akar persoalan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), wilayah Sumatera Barat dengan angka persentase kemiskinan yang tinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan angka 13.72%, dan daerah dengan persentase kemiskinan yang rendah adalah Kota Sawahlunto dengan angka 2.27%.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program seperti pelatihan keterampilan kerja, penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, serta bantuan sosial bersyarat untuk menurunkan angka kemiskinan. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi rumah tangga miskin agar lebih produktif dan mandiri. Efektivitas kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya koordinasi lintas sektor yang belum optimal dan permasalahan ketepatan sasaran penerima manfaat. Pelaksanaan kebijakan dan program yang ada belum membuahkan hasil yang optimal, karena masih terdapat ketimpangan antara perencanaan dan implementasi upaya penanggulangan kemiskinan yang terlalu berorientasi pada pendekatan sektoral (Del, 2019). Beberapa program masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan pentingnya strategi pengentasan kemiskinan yang lebih terintegrasi dan berbasis data agar dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan (Faisal & Ichsan, 2020). Pertumbuhan ekonomi berperan dalam menganalisis perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah melalui pengamatan terhadap percepatan ekonomi di daerah tersebut, sehingga dinamika ekonomi dapat dipahami dengan lebih jelas (Lavenia et al, 2023). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mencerminkan bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa (Wulandari & Rambe, 2024). Ketika kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi secara tidak langsung dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan, yang sering dikaitkan dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Wadana & Prijiyanto, 2021).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang (Putri, 2023). Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila jumlah masyarakat miskin masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri pada umumnya didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh

tiap-tiap wilayah (Wijdan et al, 2022). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2023), pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2019 – 2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,01 persen, namun mengalami kontraksi signifikan pada tahun 2020 menjadi -1,62 persen. Pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,29 persen, kemudian meningkat menjadi 4,36 persen pada tahun 2022, dan terus membaik pada tahun 2023 dengan pertumbuhan mencapai 4,62 persen. Oleh karena itu, kemiskinan di Sumatera Barat memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan nasional untuk mengurangi kemiskinan (Olasode et al, 2022). Di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang, hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tetap menjadi perhatian. Meski tingkat kemiskinan secara nasional telah menurun, akan tetapi angka ini masih menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara kelompok masyarakat (Purnomo & Istiqomah, 2019). Kelompok masyarakat miskin cenderung tidak menikmati manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi karena terbatasnya akses terhadap pendidikan dan peluang kerja yang layak.

Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti perkebunan, pertanian, dan pariwisata, akan tetapi distribusi kekayaan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan ekonomi antar daerah. Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan di beberapa wilayah di Sumatera Barat masih cukup tinggi. Sektor ekonomi yang didominasi oleh pertanian dan sektor informal cenderung memiliki tingkat produktivitas yang rendah, sementara lapangan pekerjaan formal terbatas. Selain itu, kualitas infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, memperburuk keadaan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.

Pengelolaan sumber daya alam tentu didukung oleh pembangunan manusia yang ada di dalam negara tersebut. Jika terlalu banyak orang miskin yang berpendidikan rendah, maka akan menyebabkan kekurangan individu yang memiliki keterampilan dan menyebabkan sumber daya yang tersedia terbengkalai (Arsani et al, 2020). Pada proses pembangunan, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia bisa diukur dengan bagaimana pendidikan masyarakat di suatu daerah. Menurut (Putri & Prasetyanto, 2021) pendidikan adalah salah satu aspek yang mempengaruhi kemiskinan, hal ini dikarenakan pendidikan sebagai jembatan masa depan suatu bangsa yang menyangkut karakter pembangunan bangsa.

Pendidikan yang tinggi dapat membantu proses pembangunan bangsa dengan meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan kegiatan membaca agar masyarakat menjadi individu yang cerdas dan kreatif (Putri & Prasetyanto, 2021). Tolak ukur pendidikan dapat diketahui salah satunya dengan melihat Angka Melek Huruf di suatu daerah, yang merupakan kemampuan individu dalam membaca dan menulis. Tingginya angka melek huruf maka akan menandakan kualitas pendidikan di suatu daerah yang semakin baik, (Lavenia et al, 2023). Berdasarkan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, pada tahun 2019 angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai angka 99.61%, angka ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya hingga tahun 2023 menjadi 99.71%. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan dan program pemberantasan buta huruf di berbagai daerah. Meskipun demikian, masih terdapat disparitas angka melek huruf antar provinsi dan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (BPS, 2023).

Penyebab lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran, dimana pengangguran terjadi dikarenakan oleh ketidakseimbangan antara penyediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja (Ngubane et al, 2023). Masalah pengangguran bisa menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat menurun, yang mana akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki penghasilan (Amar et al, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka berada di angka

5.38%. Angka ini mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif stabil sebelum pandemi COVID-19 melanda. Tahun 2020 menunjukkan lonjakan signifikan dalam tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat yang mencapai 6.88%.

Pandemi COVID-19 membawa dampak besar, menyebabkan banyak perusahaan menutup operasionalnya atau mengurangi tenaga kerja. Sektor informal yang menyerap sebagian besar tenaga kerja juga terpukul keras, memperburuk situasi pengangguran mulai tahun 2021, TPT menunjukkan tren penurunan, meskipun masih di atas angka pra-pandemi. Pada tahun 2021, TPT turun menjadi 6.52% seiring dengan dibukanya kembali aktivitas ekonomi dan peningkatan investasi. Pada tahun 2022, angka ini turun lagi menjadi 6.28%, menandakan pemulihan yang lebih kuat. Pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 5.94%, mendekati level sebelum pandemi, mencerminkan keberhasilan dalam menstabilkan pasar tenaga kerja. Meskipun tingkat pengangguran telah menurun, pekerjaan yang tersedia seringkali tidak mampu memberikan penghasilan yang memadai bagi banyak pekerja.

Penjelasan pada uraian di atas menunjukkan bahwa hubungan antara kemiskinan dan indikator makro masih memerlukan analisis lebih lanjut, karena peningkatan kemiskinan masih terjadi di berbagai Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dan diperlukan untuk melihat bagaimana pengaruh indikator makro di atas terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dalam menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan pada penelitian ini digunakan metode *Panel Vector Error Correction Model* (PVECM). VECM memiliki keunggulan dibandingkan model VAR karena dapat digunakan untuk menganalisis data runtut waktu (*time series*) yang belum stasioner tetapi saling berhubungan dalam jangka panjang. VECM juga bisa menunjukkan bagaimana hubungan antarvariabel berlangsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. VECM dikembangkan dengan menggabungkan data *time series* dan data dari beberapa individu atau wilayah (*cross section*) menjadi data panel, dan disebut sebagai *Panel Vector Error Correction Model* (PVECM), (Gujarati, dalam Fidiyaningsih et al (2024).

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai kemiskinan cukup penting bagi pemerintah daerah, karena masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah di Sumatera Barat, meskipun secara umum indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif atau tidak merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi dapat menjadi penghambat utama dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan karena kurangnya akses masyarakat terhadap pekerjaan produktif dan berkelanjutan. Pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan sumber daya manusia yang memiliki peran krusial dalam mendorong mobilitas sosial dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas, namun masih terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah di provinsi ini. Penelitian ini menjadi sangat relevan bagi pemerintah daerah sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam menekan angka kemiskinan, sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh. Dengan mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel tersebut, pemerintah dapat merancang strategi yang lebih terintegrasi.

Peneliti melihat adanya urgensi untuk mengkaji isu tersebut lebih lanjut melalui penelitian, yang dirumuskan dalam permasalahan berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat pada Jangka Panjang dan Jangka Pendek?
2. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat pada Jangka Panjang dan Jangka Pendek?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat pada Jangka Panjang dan Jangka Pendek?

1.3 Tujuan Penelitian

Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya mendorong peneliti untuk merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat pada Jangka Panjang dan Jangka Pendek
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat pada Jangka Panjang dan Jangka Pendek
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat pada Jangka Panjang dan Jangka Pendek

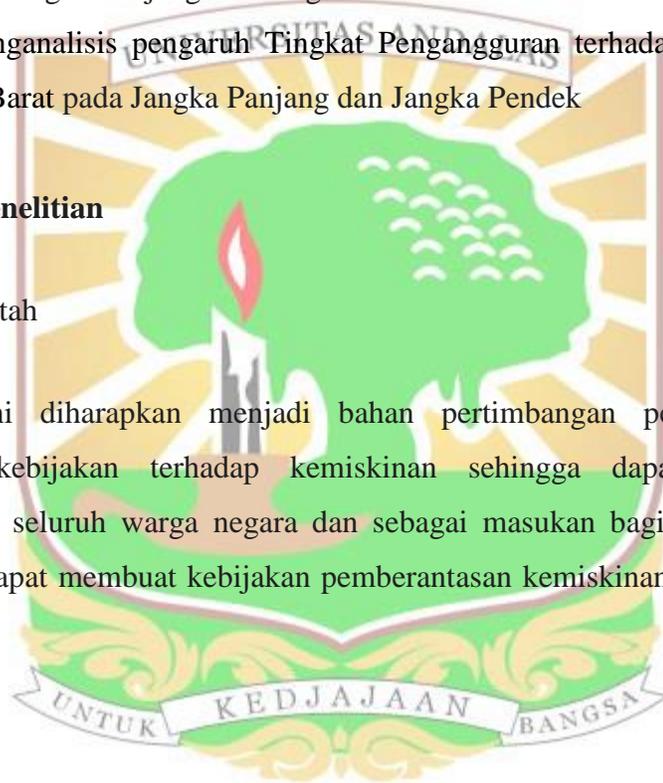
1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan terhadap kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara dan sebagai masukan bagi pemerintah agar pemerintah dapat membuat kebijakan pemberantasan kemiskinan yang efektif dan efisien.

2. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan pada masa perkuliahan dan menambah pengetahuan tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia serta salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Andalas.



1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, agar pembahasan dapat dibahas menjadi lebih rinci dan sistematis, peneliti membaginya menjadi lima bab. Dimana masing-masing bab merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan. Berikut adalah sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang dalam pembuatan penelitian, permasalahan yang akan dibahas, tujuan dari penelitian yang dilakukan, manfaat dari penelitian, dan bagaimana sistematika dalam penulisan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini menjelaskan teori-teori dasar yang terkait dengan variabel yang digunakan pada penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka konseptual hingga hipotesis pada penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, yang mana berisi tentang jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang merupakan penyajian dari hasil analisis data dan pembahasan dari permasalahan yang telah dikemukakan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan implikasi kebijakan yang diberikan kepada para pemangku kebijakan.

